BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tata kelola Pemerintahan Daerah dalam mengatasi kegiatan tambang emas tanpa izin (PETI) di Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun masih menghadapi berbagai kendala. Meskipun ada upaya dari pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk menangani masalah PETI, koordinasi antar instansi terkait masih lemah dan cenderung sektoral. Hal ini terlihat dari ketidakhadiran aparat penegak hukum dalam kegiatan sosialisasi dan kurangnya komitmen lintas sektor. Selain itu, pemerintah kecamatan memiliki kewenangan terbatas, sehingga hanya bisa mengusulkan laporan tanpa kemampuan untuk mengambil tindakan langsung di lapangan. Dengan demikian, tata kelola yang ada belum efektif dalam menyelesaikan masalah PETI secara komprehensif, mengingat pentingnya kolaborasi antara lembaga dan pemberdayaan masyarakat.

Faktor-faktor yang menghambat dalam mengatasi kegiatan tambang emas tanpa izin di Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun cukup kompleks. Salah satu faktor utama adalah kurangnya koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan dinas teknis, sehingga upaya penanganan menjadi tidak terintegrasi. Selain itu, ketiadaan data yang akurat dan terpadu menyebabkan perencanaan tindakan hukum menjadi kurang efektif. Aktivitas PETI yang bersifat tersembunyi dan berpindah-pindah juga menyulitkan proses pemantauan dan penindakan. Selain itu, faktor ekonomi menjadi hambatan besar karena masyarakat masih mengandalkan PETI sebagai sumber penghidupan utama, dikarenakan pendapatan hasil emas bisa sampai Rp. 200.000 hingga Rp.

2.000.000 per-hari, sementara alternatif pekerjaan lain tidak mencapai nominal yang disebutkan atau bahkan lebih sedikit. Kurangnya tindak lanjut terhadap program penyuluhan dan minimnya bantuan untuk pelatihan atau usaha juga memperburuk situasi.

Penelitian di Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun, menunjukkan bahwa tata kelola pertambangan belum sesuai prinsip good governance. Meski potensial secara ekonomi, praktik tambang masih lemah dalam kepatuhan hukum, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Dampaknya meliputi kerusakan lingkungan, konflik sosial, dan ketimpangan akses sumber daya. Dengan teori Soejono Soekanto (2019), serta teori kebijakan lingkungan David Easton dan John Kingdon, ditemukan bahwa kesejahteraan masyarakat belum meningkat karena distribusi hasil tambang dan program CSR yang tidak adil. Pemerintah daerah juga kesulitan mengawasi karena keterbatasan SDM, anggaran, dan regulasi yang tumpang tindih.

A. Saran

1. Bagi Penulis, diharapkan dapat melakukan kajian lebih lanjut yang mencakup analisis ekonomi masyarakat penambang, serta memperluas cakupan responden agar memperoleh gambaran yang lebih utuh terkait dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan PETI di Kecamatan Limun.
2. Bagi Kampus/Institusi Pendidikan, penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk mengembangkan program pengabdian masyarakat, terutama dalam bentuk pelatihan keterampilan alternatif dan

pemberdayaan ekonomi yang dapat dijalankan secara kolaboratif dengan pemerintah daerah.

3. Bagi Pemerintah Daerah, perlu dibentuk forum koordinasi lintas sektor secara rutin dan terpadu antara OPD, aparat penegak hukum, dan tokoh masyarakat untuk merumuskan langkah strategis dan menyeluruh dalam menangani PETI, sekaligus memperkuat database wilayah rawan tambang ilegal.
4. Bagi Pihak Kecamatan Limun sebagai Lokasi Penelitian, diharapkan dapat menjadi fasilitator aktif dalam menjembatani kebutuhan masyarakat dengan program-program pemerintah, seperti pelatihan kerja, bantuan modal usaha, serta sosialisasi hukum yang berkelanjutan, agar masyarakat memiliki alternatif selain menambang emas ilegal.
5. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan lebih menggali terhadap dampak lingkungan serta solusi yang perlu diberikan kepada pemerintahan kecamatan limun kabupaten sarolangun provinsi jambi.